



Efektivitas Kerentanan Penyelewangan Distribusi Dana Bantuan Sosial dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ciamis

Iwan Ridwan Paturchman^{1*}, Aqila Nazeeya Putri², Nazmi Fatimah Azahra²,
Yolanda Salsa Aulia²

¹Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Jalan Siliwangi No.24, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, 46115

²Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Jalan Siliwangi No.24, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, 46115

iwanridwan@unsil.ac.id, aqila.nazeeya2006@gmail.com, nazmifatimah80@gmail.com,
yolandasalsaaulia@gmail.com

Abstract. *This study examines the effectiveness of social assistance distribution and the vulnerability to misuse in rural areas, focusing on a case study in Ciamis Regency. Social assistance programs are designed to reduce poverty and maintain purchasing power among low-income households. However, implementation challenges such as data inaccuracies, weak inter-agency coordination, and limited community oversight often create opportunities for misuse. This research applies a qualitative case study approach using interviews and field observations to explore the distribution mechanism, identify potential risks of corruption, and analyze socio-economic impacts on beneficiaries. The findings reveal that although administrative procedures have been formally implemented, significant issues remain in data validation, leading to inclusion and exclusion errors. Furthermore, high discretionary power at the village level combined with limited transparency increases the likelihood of opportunistic behavior. The study also finds that misuse of social assistance negatively affects economic stability, social cohesion, and public trust in local institutions. Theoretically, the findings support the relevance of the principal-agent problem and fraud triangle theory in explaining corruption risks in public sector programs. Practically, this study recommends strengthening data integration, improving participatory monitoring systems, and enhancing institutional accountability to ensure more effective and equitable distribution of social assistance.*

Keyword: *saccountability; corruption risk; social assistance; public policy; welfare*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial serta mengidentifikasi kerentanan penyelewangan yang terjadi di tingkat desa dengan studi kasus di Kabupaten Ciamis. Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakakuratan data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pengawasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur administratif telah berjalan sesuai ketentuan, masih terdapat kesalahan sasaran akibat permasalahan data (inclusion dan exclusion error). Selain itu, tingginya diskresi aparat desa tanpa pengawasan memadai membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat serta stabilitas sosial. Secara teoritis, temuan ini memperkuat relevansi teori principal-agent dan fraud triangle dalam menjelaskan potensi korupsi di sektor publik. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, transparansi data, serta partisipasi masyarakat dalam proses distribusi bantuan sosial.

Kata kunci: akuntabilitas; bantuan sosial; kesejahteraan; korupsi; kebijakan publik

1. LATAR BELAKANG

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan serta menjaga stabilitas ekonomi

masyarakat. Program ini memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan hidup kelompok rentan, terutama dalam menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi seperti krisis global, inflasi, maupun dampak pandemi (Suryahadi & Al Izzati, 2020). Dalam konteks pembangunan ekonomi, bantuan sosial juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan sosial (Widodo & Handoko, 2020).

Dalam implementasinya, bantuan sosial diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program ini masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan ketepatan sasaran dan kualitas tata kelola (Nugroho, 2022; Sari, 2021). Ketidaktepatan sasaran sering kali disebabkan oleh ketidakakuratan data penerima manfaat, yang dikenal dengan istilah *inclusion error* dan *exclusion error* (Pratama, 2023; Putri & Kurniawan, 2021).

Permasalahan data menjadi isu krusial dalam distribusi bantuan sosial di Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama penentuan penerima bantuan sering kali tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat. Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran dan mengurangi efektivitas program secara keseluruhan.

Selain itu, kompleksitas birokrasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat. Proses distribusi yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan sering kali tidak berjalan secara sinkron, sehingga menimbulkan keterlambatan dan ketidakefisienan (Kementerian Sosial RI, 2021).

Permasalahan yang lebih serius adalah adanya potensi penyelewangan dalam distribusi bantuan sosial. Berdasarkan laporan KPK, sektor bantuan sosial masih menjadi salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi (KPK, 2023; Rahman & Yusuf, 2022).

Tabel 1. Kasus Korupsi Bantuan Sosial

Tahun	Kasus	Kerugian
2020	12	Rp 2,08 T
2021	8	Rp 150 M

Tahun	Kasus	Kerugian
2022	10	Rp 120 M
2023	7	Rp 80 M
2024	5	Rp 45 M

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2023 (diolah)

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori principal-agent dan fraud triangle (Mardiasmo, 2021; Prasetyo & Widodo, 2022). Dampak dari kondisi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kelembagaan, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat serta meningkatnya konflik sosial (Wahyudi & Santoso, 2021; Setiawan & Lestari, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas distribusi bantuan sosial, mengidentifikasi faktor kerentanan penyelewangan, serta mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Akuntabilitas Sektor Publik

Akuntabilitas sektor publik merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan kewajiban aparatur untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup transparansi dalam proses penentuan penerima serta keadilan dalam distribusi (Mardiasmo, 2021).

Permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya keterbukaan informasi terkait daftar penerima bantuan dan mekanisme distribusinya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit melakukan pengawasan secara langsung, sehingga meningkatkan

potensi terjadinya penyimpangan. Selain itu, lemahnya akuntabilitas juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam praktiknya, akuntabilitas yang baik memerlukan dukungan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan tersebut, proses distribusi bantuan sosial dapat diawasi secara lebih luas, sehingga meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.

B. Teori Fraud Triangle

Teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa kecurangan terjadi akibat interaksi antara tiga faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Prasetyo & Widodo, 2022). Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan individu melakukan tindakan penyimpangan.

Dalam konteks distribusi bantuan sosial, tekanan dapat muncul dari kebutuhan ekonomi maupun tuntutan sosial terhadap aparatur desa. Kesempatan terbentuk akibat lemahnya sistem pengawasan, ketidakakuratan data penerima, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Sementara itu, rasionalisasi terjadi ketika pelaku membenarkan tindakannya, misalnya dengan menganggap penyimpangan sebagai hal yang wajar atau sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan.

Ketiga faktor ini sering muncul secara bersamaan dalam implementasi bantuan sosial, sehingga meningkatkan risiko penyelewengan. Oleh karena itu, pencegahan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada perbaikan sistem, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial.

C. Teori Principal-Agent

Teori *principal-agent* menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat (*principal*) dan pihak pelaksana (*agent*) dalam suatu sistem organisasi. Dalam konteks distribusi

bantuan sosial, pemerintah pusat berperan sebagai *principal*, sedangkan aparaturnya bertindak sebagai *agent* yang menjalankan program di lapangan (Mardiasmo, 2021).

Permasalahan utama dalam hubungan ini terletak pada ketimpangan informasi (*information asymmetry*), di mana pihak pelaksana memiliki informasi yang lebih rinci dibandingkan dengan pihak pemberi mandat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *moral hazard*, yaitu tindakan penyimpangan yang dilakukan karena lemahnya pengawasan.

Dalam praktiknya, aparaturnya memiliki kewenangan dalam proses pendataan dan penentuan penerima bantuan. Tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan tersebut dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol yang kuat, transparansi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan agar implementasi kebijakan berjalan lebih akuntabel.

D. Bantuan Sosial dan Kesejahteraan

Bantuan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial (Fahrudin, 2020).

Dalam implementasinya, bantuan sosial diharapkan mampu meningkatkan daya beli serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas tata kelola. Ketidaktepatan distribusi dapat mengurangi manfaat program bahkan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Selain itu, keberhasilan bantuan sosial juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, literasi masyarakat, dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, pengelolaan bantuan sosial perlu dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

E. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas data, transparansi, dan sistem pengawasan. Handayani dan Saputra (2022) menemukan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi serta mempermudah proses pelacakan distribusi bantuan. Namun, implementasi sistem digital masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi teknologi di tingkat masyarakat.

Selanjutnya, Pratama (2023) menyoroti bahwa ketidakakuratan data menjadi permasalahan utama dalam distribusi bantuan sosial. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesalahan sasaran, baik dalam bentuk inclusion error maupun exclusion error. Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem pendataan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas program.

Penelitian lain menegaskan bahwa transparansi di tingkat desa memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mengurangi potensi konflik sosial (Setiawan & Lestari, 2023). Keterbukaan informasi terkait penerima bantuan memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengawasan, sehingga dapat menekan peluang terjadinya penyimpangan.

Di sisi lain, Rahman dan Yusuf (2022) menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki tingkat risiko korupsi yang relatif tinggi, terutama ketika sistem pengawasan tidak berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran dan kompleksitas distribusi memerlukan sistem kontrol yang lebih kuat dan terintegrasi.

Selain itu, Susanti dan Prakoso (2022) menekankan bahwa literasi masyarakat juga berpengaruh terhadap efektivitas bantuan sosial. Masyarakat yang memahami mekanisme program cenderung lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan ketidaksesuaian. Sementara itu, penelitian oleh Widodo dan Handoko (2020) serta Yusuf (2021) menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, khususnya apabila disalurkan secara tepat sasaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirancang, tetapi juga oleh kualitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas distribusi dan kerentanan penyelewangan di tingkat desa sebagai upaya untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara tata kelola bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena distribusi bantuan sosial secara mendalam dan kontekstual. Penelitian dilakukan pada tahun 2026 di salah satu desa di Kabupaten Ciamis yang menjadi penerima program bantuan sosial. Informan penelitian terdiri dari 1 perangkat desa dan 5 masyarakat penerima bantuan sosial yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung yang relevan. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memperkuat temuan di lapangan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Distribusi Bantuan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, proses distribusi bantuan sosial di tingkat desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari pendataan hingga penyaluran kepada penerima manfaat. Namun, efektivitas distribusi tersebut masih belum optimal karena adanya ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi riil di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas data masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Hal ini juga

didukung oleh penelitian Sari dan Nugroho (2024) yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas distribusi bantuan sosial.

Ketidakakuratan data menyebabkan terjadinya kesalahan sasaran, baik dalam bentuk *inclusion error* maupun *exclusion error*. Kondisi ini memperkuat temuan Pratama (2023) serta Putri dan Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa validitas data merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program bantuan sosial. Dari perspektif teori akuntabilitas sektor publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya transparansi dan pengelolaan informasi dalam proses distribusi (Mardiasmo, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh kualitas sistem data yang digunakan. Pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi bantuan sosial juga terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran (Hidayat & Amalia, 2023).

B. Kerentanan Penyelewangan dalam Distribusi Bantuan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses distribusi bantuan sosial masih memiliki kerentanan terhadap penyelewangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi faktor penting dalam meminimalisir potensi penyimpangan (Firmansyah & Dewi, 2022). Terutama pada tahap pendataan dan penentuan penerima manfaat. Tingginya diskresi aparat desa dalam menentukan penerima bantuan tanpa pengawasan yang memadai membuka peluang terjadinya penyimpangan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang ada belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif teori *fraud triangle*, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Prasetyo & Widodo, 2022). Kesempatan muncul akibat lemahnya pengawasan, sedangkan rasionalisasi terjadi ketika pelaku menganggap tindakan tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, dalam kerangka *principal-agent*, ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan aparat desa juga meningkatkan potensi terjadinya *moral hazard* (Mardiasmo, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Yusuf (2022) yang menegaskan bahwa program bantuan sosial memiliki risiko korupsi yang tinggi apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang kuat.

C. Dampak Penyelewangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penyelewangan dalam distribusi bantuan sosial memberikan dampak yang luas terhadap kondisi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Efektivitas program perlindungan sosial memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lestari & Utami, 2021). Dampak tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Dampak Penyelewangan Bantuan Sosial

Dimensi	Temuan	Dampak
Ekonomi	Penurunan daya beli	Kemiskinan meningkat
Sosial	Konflik warga	Disintegrasi sosial
Institusi	Ketidakpercayaan	Legitimasi menurun
Moral	Normalisasi pungli	Kerusakan integritas

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2 Penyelewangan dalam distribusi bantuan sosial memberikan dampak yang luas terhadap kondisi masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi. Program bantuan sosial pada dasarnya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat rentan (Nugraha, 2020). Namun, ketika distribusi bantuan tidak tepat sasaran, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya beli dan berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo dan Handoko (2020) yang menyatakan bahwa bantuan sosial memiliki kontribusi signifikan dalam menekan angka kemiskinan apabila disalurkan secara tepat. Dari sisi sosial, ketidakadilan dalam distribusi bantuan memicu konflik dan kecemburuan sosial di masyarakat (Wahyudi & Santoso, 2021).

Selain itu, dari sisi kelembagaan, penyelewangan bantuan sosial berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Setiawan & Lestari, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa dampak penyelewengan bersifat multidimensi dan dapat memengaruhi stabilitas sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas data, penguatan pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses distribusi, sebagaimana juga ditegaskan oleh Susanti dan Prakoso (2022). Secara global, penguatan sistem perlindungan sosial menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat (World Bank, 2020; OECD, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan sosial di tingkat desa di Kabupaten Ciamis secara administratif telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun belum sepenuhnya efektif. Permasalahan utama terletak pada ketidakakuratan data penerima bantuan yang menyebabkan terjadinya kesalahan sasaran, baik dalam bentuk *inclusion error* maupun *exclusion error*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sistem data masih menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kerentanan penyelewengan dalam proses distribusi bantuan sosial, terutama akibat tingginya diskresi aparatur desa yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Dalam perspektif teoritis, kondisi ini sejalan dengan konsep *fraud triangle* dan *principal-agent*, yang menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, serta ketimpangan informasi dapat mendorong terjadinya penyimpangan. Dampak dari penyelewengan tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan kelembagaan, seperti meningkatnya konflik masyarakat serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang konstruktif selama proses penelitian. Selain itu, penulis juga mengapresiasi perangkat desa dan masyarakat yang telah bersedia menjadi informan serta meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Firmansyah, I., & Dewi, K. (2022). Analisis pengawasan dalam distribusi bantuan sosial. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 200–215.
- Handayani, R., & Saputra, D. (2022). Digitalisasi bantuan sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 123–135.
- Hidayat, T., & Amalia, R. (2023). Implementasi kebijakan bantuan sosial berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 90–105.
- Lestari, P., & Utami, S. (2021). Efektivitas program perlindungan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(1), 75–89.
- Nugraha, D. (2020). Kebijakan bantuan sosial dalam perspektif ekonomi pembangunan. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 5(2), 120–135.
- Prasetyo, A., & Widodo, T. (2022). Analisis fraud triangle dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 45–60.
- Pratama, R. (2023). Permasalahan akurasi data dalam program bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 67–78.
- Putri, N., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi ketepatan sasaran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 101–115.
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2022). Risiko korupsi dalam distribusi bantuan sosial: Perspektif tata kelola publik. *Jurnal Governance*, 7(1), 89–102.
- Sari, M., & Nugroho, A. (2024). Governance dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 12(1), 33–47.
- Setiawan, H., & Lestari, S. (2023). Transparansi pengelolaan bantuan sosial di tingkat desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 55–70.
- Susanti, D., & Prakoso, A. (2022). Peran literasi masyarakat dalam efektivitas bantuan sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 11(2), 140–152.
- Wahyudi, A., & Santoso, B. (2021). Konflik sosial akibat ketidaktepatan distribusi bantuan sosial. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 27(1), 45–59.

Widodo, J., & Handoko, R. (2020). Dampak bantuan sosial terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(1), 1–12.

Yusuf, M. (2021). Efektivitas program bantuan sosial dalam menekan ketimpangan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modern*, 9(2), 88–100.

Buku Teks

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)*. Jakarta: Kemensos RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK.

Sumber dari Internet dengan Nama Organisasi/Perusahaan

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Diakses dari <https://kemensos.go.id>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan tahunan KPK 2023. Diakses dari <https://www.kpk.go.id>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Preventing corruption in public procurement*. Available at: <https://www.oecd.org>

World Bank. (2020). *Social protection and jobs responses to COVID-19*. Available at: <https://www.worldbank.org>